

PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA OLEH PEJABAT LEGISLATIF DAN TOKOH PARTAI TINGKAT KOTA DI SUMATRA BARAT DALAM MEDIA SOSIAL

Maharanni, Novia Juita

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Padang

Email: azwarmaharanni@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study was to describe the forms of violations of the principle of cooperation by legislative officials and city level party leaders in West Sumatra on social media. This study used a qualitative-descriptive method. The data source in this study is in the form of speech in the Facebook status of officials and party leaders. The object of this research is the speech on Facebook of legislative and party leaders. Data collection was carried out by (1) printing screenings on Facebook of city-level legislative and party leaders in West Sumatra; (2) transcribing writings on facebook city level legislative and party figure officials in West Sumatra; (3) pay close attention to the writings on Facebook of city-level legislative and party figure officials in West Sumatra which are included in the section on language performance and politeness of communication; and (4) determine data included in the language performance section and politeness of written communication. Analyzing data is done with the aim of grouping data, analyzing data, and determining conclusions.

Keywords: *performance, facebook, linguistic, communication*

A. Pendahuluan

Media sosial merupakan alat yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka dan berbagi dengan teman-teman yang ada dalam media tersebut. Tujuan masyarakat menggunakan media sosial, yakni sebagai bentuk komunikasi dalam bahasa tulis. Selain untuk komunikasi, tata cara penulisan dalam status *facebook* juga perlu diperhatikan oleh para pengguna, karena kaidah penulisan bahasa yang benar tidak hanya tertuju kepada bahasa resmi seperti artikel ilmiah, media cetak, dan lain-lain. Namun harus disamaratakan pada media sosial sebagai masyarakat Indonesia yang peduli akan kaidah penulisan, tidak terkecuali pada pejabat legislatif dan tokoh partai.

Pejabat maupun tokoh partai adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Mereka merupakan salah satu contoh bagaimana menyalurkan bentuk aspirasi kepada masyarakat untuk dapat dipilih dan dipercayai

memimpin dan memberikan perubahan positif pada suatu wilayah tertentu. Untuk itu, media sosial dimanfaatkan sebagai wadah untuk memperlihatkan bukti kegiatan penting mereka kepada masyarakat. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010, pejabat publik harus sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat. Tidak hanya di dunia nyata saja, tetapi juga di dunia maya. Dari situlah tokoh partai harus berlaku santun terutama dalam dunia maya (media sosial), karena dari situlah masyarakat bisa menilai seberapa santun pejabat dan tokoh partai tersebut berkomunikasi dalam media sosial.

Konsep baik dan benar dalam pemakaian bahasa Indonesia baik baku maupun nonbaku saling mendukung dan saling berkait. Tidaklah logis jika ada pemakaian atau penggunaan bahasa Indonesia yang baik, tetapi tidak benar, atau pemakaian bahasa yang benar tetapi tidak baik. Oleh karena itu, konsep yang benar adalah pemakaian bahasa yang baik harus juga merupakan pemakaian bahasa yang benar atau sebaliknya.

Untuk itu, penelitian ini dibuat agar dapat diterima dan dipahami dengan baik, perlu adanya suatu kerjasama, yang disebut prinsip kerja sama percakapan. Grice (dalam Leech, 1993:11-12) mengemukakan di dalam rangka melaksanakan prinsip kerja sama itu, setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan (*conversational maxim*), yakni maksim kuantitas (*maxim of quantity*), maksim kualitas (*maxim of quality*), maksim relevansi (*maxim of relevance*), dan maksim cara (*maxim of manner*).

Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Sebagai contoh, lihatlah wacana berikut.

+ *Siapa namamu?*

- *Ani*

+ *Rumahmu di mana?*

- *Klaten, tepatnya di Pedan.*

+ *Sudah bekerja?*

- *Belum, masih mencari-cari.*

Pada wacana di atas, terlihat (-) bersifat kooperatif sehingga memberikan kontribusi yang secara kuantitas memadai atau mencukupi pada setiap tahapan komunikasi.

Maksim kualitas ini mengharuskan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya. Kontribusi peserta percakapan hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Misalnya, seseorang harus mengatakan bahwa ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Bukan kota-kota yang lain kecuali kalau benar-benar tidak tahu. Akan tetapi, bila terjadi hal yang sebaliknya, tentu ada alasan-alasan mengapa hal demikian bisa terjadi.

Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Sebagai contoh, lihatlah wacana berikut.

+ Pukul berapa sekarang, Bu.

- Tukang Koran baru lewat.

Jawaban (-) di atas sepiantas seperti tidak ada hubungannya, tetapi bila dicermati, hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Kontribusi (-) memang tidak secara eksplisit menjawab pertanyaan (+). Dengan memperhatikan kebiasaan tukang koran mengantarkan surat kabar kepada mereka, tokoh (+) dapat membuat interferensi pukul berapa saat itu.

Maksim cara mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan, serta runtut. Sebagai contoh, lihatlah contoh yang dikemukakan oleh Parker (dalam Wijana, 1996:50) berikut.

+ Nanti kalau di Gardena jangan lewat di tempat b-o-n-e-k-a, ya!

Dengan maksim ini, seorang penutur juga diharuskan menafsirkan kata-kata yang digunakan oleh lawan bicaranya secara taksa berdasarkan konteks-konteks pemakaiannya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran maksim prinsip kerja sama pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kota di Sumatera Barat dalam media sosial. Pemakaian dan penulisan bahasa yang santun patut untuk diperhatikan karena sebagai bangsa yang berbudaya, kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa yang beretika tinggi. Selain itu, bahasa yang digunakan tokoh publik menjadi patokan masyarakat dalam berbahasa. Masyarakat cenderung untuk meniru cara

berbahasa tokoh publik yang dilihatnya, termasuk ketika berkomunikasi menggunakan *Facebook*.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dikatakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara utuh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Selain itu penelitian ini mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji secara empiris

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena data diuraikan dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar, bukan dalam bentuk angka-angka. Data pada umumnya berupa pencatatan, foto-foto, dokumen, dan catatan resmi lainnya. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan fakta-fakta mengenai performa bahasa dan kesantunan komunikasi tulis pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kota di Sumatra Barat dalam *Facebook*.

Data penelitian ini berupa tuturan-tuturan yang ditulis oleh beberapa pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kota di Sumatra Barat melalui akun *Facebook*. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan beberapa status *Facebook* dari pejabat legislatif dan tokoh partai kota Padang, pejabat legislatif dan tokoh partai kota Pariaman, pejabat legislatif dan tokoh partai kota Bukittinggi, pejabat legislatif dan tokoh partai kota Solok, pejabat legislatif dan tokoh partai kota Sawahlunto, pejabat legislatif dan tokoh partai kota Payakumbuh, dan pejabat legislatif dan tokoh partai kota Padang Panjang.

Sumber data penelitian ini adalah hasil *printscreen* tuturan-tuturan dari *facebook*, seperti tokoh partai yang ada di *Sumatra Barat*, contohnya Wahyu Iramana Putra (Ketua Partai Golkar Kota Padang), Fauzi Hasan (Ketua Partai Demokrat Kota Sawahlunto), Gusti Putra (Ketua Partai PAN Kota Payakumbuh), Yendri Muchlis (Ketua Partai PKS Kota Pariaman), Gema Yudha (Ketua Partai Perindo Kota Padang Panjang), Alfian (Ketua Partai NasDem Kota Bukittinggi), dan masih banyak lagi yang diubah

formatnya dalam bentuk *picture* (.jpg). Hasil *printscreen* kemudian disalin ke dalam bentuk tabel data dan tabel data inilah yang kemudian menjadi data yang dikaji dalam penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan tuturan yang mematuhi dan melanggar prinsip kerjasama dalam status *facebook* pejabat legislatif dan tokoh partai ini. Sebanyak 21 pejabat dan tokoh partai dengan tuturan berjumlah 200 tuturan, dan 189 data gambar/ *screenshot* status *facebook*. Dalam pembahasan prinsip kerjasama ini, maksim yang digunakan dalam tuturan di antaranya, maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rincian Total Penggunaan Tuturan yang Mematuhi dan Melanggar Prinsip Kerjasama

No	Penggunaan Tuturan	Mematuhi	Melanggar
1	Maksim Kuantitas	53 tuturan	15 tuturan
2	Maksim Kualitas	36 tuturan	1 tuturan
3	Maksim Relevansi	26 tuturan	4 tuturan
4	Maksim Cara	56 tuturan	9 tuturan
Total		171 tuturan	29 tuturan

a. Tuturan yang Melanggar Prinsip Kerjasama Maksim Kuantitas

Dalam penelitian ini, dari 200 data yang telah dianalisis, ditemukan sebanyak 15 tuturan yang melanggar maksim kuantitas. Berikut ini beberapa tuturan yang mewakili.

(176) Selamat Bang Idrus Marham Sekjen DPP Partai Golkar sebagai Menteri Sosial RI,.. Semoga Amanah dan menjadi Sahabat Rakyat.. Allah SWT Selalu memperlihatkan yang Terbaik.. Salam GM MM/5

Tuturan (176) dikatakan melanggar, karena pada prinsipnya maksim kuantitas adalah maksim yang menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Untuk tuturan di atas jelas melanggar maksim kuantitas, terutama pada tuturan *Sekjen DPP Partai Golkar* tidak perlu disebutkan, karena jabatan beliau sekarang juga sudah disebutkan dalam tuturan setelah itu. Tuturan *Allah SWT Selalu memperlihatkan yang Terbaik* juga tidak perlu disampaikan, karena kata-kata sebelumnya sudah memberikan kontribusi yang cukup bagi lawan bicara.

(177) Bersama rekan's sekantor di Bank Nagari yg telah purna tugas kecuali pak hendri se yg sekarang menjabat direktur kredit. FH/12

Tuturan (177) dinilai melanggar maksim kuantitas, karena informasi atau tuturan yang diberikan melebihi apa dibutuhkan. Dalam tuturan *kecuali pak hendri se yg sekarang menjabat direktur kredit*, sebenarnya tidak perlu disampaikan karena yang dibicarakan bukan kontribusi yang dibutuhkan lawan bicara pada tuturan (177).

(178) Melihat Kualitas dan "isi" dari Kandidat Walikota dan Wakil Walikota..Silahkan kita Cermati dan Amati ... MHM/4

Tuturan (178), dinilai melanggar maksim kuantitas, dalam tuturan *Silahkan kita Cermati dan Amati* sudah diberi penjelasan dengan kata *Melihat*, yang berarti mencermati dan mengamati. Jadi dalam tuturan (178) dikatakan melanggar, karena melebihi informasi yang dibutuhkan lawan bicara.

a. Tuturan yang Melanggar Maksim Kualitas

Dalam penelitian ini dari 200 tuturan yang telah dianalisis, yang melanggar maksim kualitas hanya satu tuturan. Berikut dijelaskan.

(179) Serius nih..? Udah makan Korban masih begini statusnya dan anggap komedi ? MHM/6

Tuturan di atas melanggar maksim kualitas, karena kontribusi percakapan belum berdasarkan bukti yang memadai dalam konteks pembicaraannya.

b. Tuturan yang Melanggar Maksim Relevansi

Dalam penelitian ini dari 200 tuturan yang telah dianalisis, yang melanggar maksim Relevansi berjumlah empat tuturan. Berikut dijelaskan data yang mewakili.

(180) InshaALLAH.. Saya akan Tetap Bersuara Lantang...!!!
Mereka Telah Gunakan "Tangan Penguasa.." Jangan
BUNGKAM Saya....!!!_Semoga ALLAH SWT memberikan
Kekuatan dalam Perjuangan ini... Mohon Doa..

Tuturan ini dinilai melanggar maksim relevansi, karena tidak memberikan kontribusi yang baik antara penutur dengan lawan tutur. Walaupun dalam tuturan penutur diakhir meminta sesuatu, namun di awal tuturan makna tuturan ada yang bisa menerima dan ada lawan bicara yang tidak bisa menerima.

(181) Kalo memang mampu membesarkan kenapa ga dari
dulu ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Ini saatnya
berbuat bukan hanya bicara. Buktikan kalo memang
mampu.

Tuturan (181), dinilai melanggar maksim relevansi, karena karena tidak memberikan kontribusi yang baik antara penutur dengan lawan tutur. Setiap tuturan tidak ada kata-kata yang membuat lawan tutur akan memberikan kontribusi yang relevan.

c. Tuturan yang Melanggar Maksim Cara

(182) Pertemuan dgn DPRD Kota Palembang,khusus
pembicaraan pengelolaan Parkir hadir Dishub Kota
Palembang,malah Dishub Kota Padang diundang
malah tdk hadir,mungkin disengaja kali, WIP/1

Tuturan (182), dinilai melanggar maksim cara, karena penutur terlalu berlebihan mengutarakan pendapat, sehingga akan mendapat respon negatif dari lawan tutur.

(183) Bukannya berduka, malah ditambah prasangka..5
jiwa prajurit melayang pak ustadz..dan dua korban
luka..jangan karena Mau Pilpres bgini pun dijadikan
issue ..apa hubungannya dgn Jokowi tuh Ustadz..??

Naudhubillahmin dzhaliq.. MHM/7

Tuturan (183), jelas melanggar maksim cara, karena penutur tidak mempertimbangkan pembicaraannya kepada lawan bicara. Dapat diistilahkan jawaban atau respon yang diterima pun tidak akan mendapatkan kontribusi yang baik.

(184) Capek, lelah, letih dan lesu, tapi tetap harus semangat,
semoga Allah meridhoi setiap langkah dan usaha hamba,
amin IRB/18

Tuturan (184), bermakna meminta sesuatu dari lawan bicara untuk hal yang menguntungkan bagi dirinya. Tuturan yang disampaikan pun juga dapat dikatakan berlebihan. Tuturan dibuat lebih ke arah melanggar maksim cara.

Dalam penelitian ini, dari performa bahasa dari segi prinsip kerja sama ditemukan 171 tuturan yang mematuhi, sebanyak 29 tuturan yang melanggar, dan 8 tuturan yang ditemukan tidak termasuk kategori prinsip kerja sama.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelanggaran maksim prinsip kerja sama pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kota di Sumatra Barat dalam media sosial dapat disimpulkan, sebanyak 200 data/tuturan yang teliti, dalam penggunaan maksim kuantitas, ditemukan sebanyak 53 tuturan yang mematuhi dan 15 tuturan yang melanggar, dalam penggunaan maksim kualitas, ditemukan sebanyak 36 tuturan yang mematuhi dan 1 tuturan yang melanggar, dalam penggunaan maksim relevansi, ditemukan sebanyak 26 tuturan yang mematuhi dan 4 tuturan yang melanggar, dalam penggunaan maksim cara ditemukan sebanyak 56 tuturan yang mematuhi dan 9 tuturan yang melanggar. Tuturan yang melanggar tersebut membuktikan masih lemahnya kepedulian oleh para pejabat dan tokoh partai ini untuk memahami penggunaan bahasa khususnya dari segi prinsip kerja sama.

2. Saran

Penelitian ini bisa memberikan gambaran untuk dapat mematuhi aturan-aturan penggunaan bahasa mulai dari EBI, kosakata, struktur kalimat, prinsip kerjasama, hingga kesantunan berbahasa walaupun kesalahan itu ditemukan di media sosial. Setidaknya warga dapat melihat dan juga menilai penggunaan bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi dengan masyarakat apakah layak atau tidak layak, baik atau tidak baik, bagus atau tidak bagus dalam pemakaian bahasa yang digunakan.

Daftar Rujukan

- Astuti, Arum. (2014). Analisis Tindak Tutur pada Spanduk di Wilayah Sukoharjo: Tinjauan Pragmatik. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2004. *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2010. *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2009. *Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cummings, Louise. 2007. *Pragmatik Sebuah Perspektif Multidisipliner*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ermanto dan Emidar. 2015. *Bahasa Indonesia: Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Padang: UNP Press.
- Ikhwani, Muhammad., Susilo, Firman., & Syahrani, Agus. (2012). Kesantunan Berbahasa dalam Media Jejaring Sosial (*Facebook*) Grup *Comedy and Outreaching* Universitas Negeri Padang Tahun 2012, 1-13.
- Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Putra, Riyan Nofardo. 2018. "Performa Bahasa dan Kesantunan Komunikasi Bupati di Sumatera Barat dalam Media Sosial". *Skripsi*. Padang: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNP.

- Rizaldi, Muhammad Okto. 2018. "Performa Bahasa dan Kesantunan Komunikasi Walikota di Sumatera Barat dalam Media Sosial". *Skripsi*. Padang: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNP.
- Sasangka, Sry Satriya Tjatur Wisnu. 2014. *Kalimat*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yule, George. 2006. *Pragmatik*. Diterjemahkan oleh Indah Fajar Wahyuni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.